

BAB V

KESIMPULAN

Analisis penelitian dilakukan terhadap 84 responden para pejabat struktural, yang terdiri dari kepala badan/dinas/kantor, kepala bidang/subdinas/bagian, kepala subbidang/seksi/subbagian yang ada di kabupaten Banjarnegara. Ada empat variabel pokok yang mendapat perhatian dalam penelitian ini, yaitu kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, sistem pengendalian akuntansi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pejabat struktural.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di kabupaten Banjarnegara dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 84 responden kabupaten Banjarnegara dapat ditarik kesimpulan :

1. Hipotesis pertama (H_1) diterima bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pejabat struktural dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara. Kejelasan tujuan anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah kabupaten Banjarnegara. Semakin jelas tujuan anggaran cenderung membuat aparat lebih aktif didalam memahami anggaran. Pemahaman anggaran akan membuat aparat melaksanakan anggaran sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini berarti pemahaman aparat terhadap tujuan anggaran menunjukkan tingginya kinerja aparat pemerintah daerah.
2. Hipotesis kedua (H_2) ditolak bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pejabat

struktural dilingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukkan organisasi pada kabupaten Banjarnegara yang diteliti kemungkinan tidak mengikutsertakan manajer tingkat menengah dan bawah dalam proses penyusunan anggaran sehingga diharapkannya partisipasi aparat dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan kesadaran aparat pemerintah kabupaten banjarnegara dalam mempertanggungjawabkan anggaran. Hal ini berarti kesadaran aparat dalam mempertanggungjawabkan anggaran akan menjadikan tingginya kinerja aparat pemerintah daerah.

3. Hipotesis ketiga (H_3) diterima bahwa sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pejabat struktural dilingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten Banjarnegara memiliki indikator kinerja yang ekonomis, efisien dan efektif pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah. Pengendalian akuntansi yang diterapkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga pejabat struktural di kabupaten Banjarnegara diharapkan menggunakan pengendalian akuntansi sesering mungkin dan menambah informasi untuk pengambilan keputusan kinerja instansi pemerintah.

berikut ini adalah beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mengganggu hasil penelitian ini :

1. Penulis hanya memasukan 3 (tiga variabel) *independent* yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, yaitu kejelasan sasaran

anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi.

Di duga masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Penelitian ini menerapkan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, padahal metode survei menurut Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Rahmalia (2005) yang dimaksud dengan metode survei adalah pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.
3. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dimana jawaban yang diberikan responden besar dipengaruhi oleh subyektivitas.
4. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu waktu (*cross sectional*). Perilaku individu dimungkinkan senantiasa berubah dari waktu ke waktu.

Saran untuk pemerintah daerah dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini minimal dapat memotivasi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Penelitian berikutnya perlu menambahkan variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
3. Studi ini memberikan masukan kepada pejabat lingkungan instansi pemerintah daerah di kabupaten Banjarnegara untuk mempertimbangkan faktor kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi karena dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja.
4. Guna mengoptimalisasi fungsi anggaran sebagai pencegah perilaku disfungsi dari pemerintah daerah, maka diharapkan pihak pemerintah daerah dalam

perencanaan anggaran agar dilakukan secara jelas, tidak membingungkan, dan sesuai dengan urutan prioritas kepentingan kegiatan yang akan dilakukan.

5. Perlu adanya upaya-upaya dari pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya saat penyusunan anggaran sehingga dapat dicapai akuntabilitas publik yang efektif, efisien, merata dan adil.
6. Dapat disadari, bahwa partisipasi penyusunan anggaran yang baik mempunyai andil besar untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya di kabupaten Banjarnegara.
7. Pemerintah daerah perlu melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam proses penganggaran daerah.
8. Penggunaan pengendalian akuntansi pada instansi pemerintah daerah di kabupaten Banjarnegara akan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena dengan pengendalian akuntansi pengelolaan sumber daya lebih ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengurangi keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini. Selain itu perlu dicari terus desain pengendalian yang paling *fit* dengan faktor konstektual. Agenda riset lainnya yang lebih kompleks (dalam kaitannya dengan model kontijensi pengendalian) adalah dengan penjabaran konsep yang lebih jelas lagi serta metode riset yang jauh lebih kompleks